

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Martani, Debby Fitriyani, Annisa. 2013. *Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*.
- Edwin Nurdiansyah. 2016. *Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*.
- Groos, C. 2001. *Manajemen Pelayanan dan Pemasaran*. Terjemahan Maskur. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, and H., Silfianti, W. 2012. Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol 43 No.2: 229-235.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.
- Izzuddin Arridlo. 2018. *Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Dengan Internet Financial Reporting Berbasis Website Pada Lembaga Pemerintah Desa Di Jawa Timur*.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Nona Yohana. Tantri Puspita Yazid, 2014. *Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance*.

- Pamudji. 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Daerah Masing-Masing.
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Tujuan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Bentuk Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah.
- Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Komponen-Komponen Informasi keuangan Daerah.
- Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 7 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 tentang Kewajiban Badan Publik.
- Pasal 9 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Puspita, Rora., Dwi Martani. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya. 2014. Peranan E-Government Dalam Mendukung Tranparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Pemerintah Kabupaten Klungkung).
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rose, M. 2004. Democratizing Information and Communication by Implementing e-Government in Indonesian Regional Government. *The International Information & Library Review* 36: 219–226.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wahyudi Kumorotomo. 2008. Pengembangan E-Government Dalam Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik.

Wibawa dan Yuyun, 2002. Pengertian dan Konsep Good Governance.

<https://opyaroffah.wordpress.com/model-strategi-penerapan-e-government-indonesia/>

<http://governmenttp.blogspot.co.id/2012/11/pengembangan-e-government-di-indonesia.html>

<http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>

<http://www.jatimprov.go.id/>